



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9C TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membuka akses bagi masyarakat terhadap informasi publik Mahkamah Konstitusi, mempertahankan akuntabilitas dan transparansi, serta kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan penetapan Daftar Informasi Publik Mahkamah Konstitusi Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Mahkamah Konstitusi Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Mahkamah Konstitusi Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023.**
- KESATU :** Menetapkan Daftar Informasi Publik Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Yth. Sekretaris Komisi Informasi Pusat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**



Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
 Nomor : 9C Tahun 2023
 Tanggal : 3 Januari 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1.	Pengumuman	(Masing-masing Biro Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
2.	Profil MK <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah • Visi Misi • Kedudukan dan Kewenangan • Struktur Organisasi <ul style="list-style-type: none"> · Profil Hakim Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> ❖ Hakim Konstitusi ❖ Hakim Masa Jabatan Sebelumnya · Profil Panitera <ul style="list-style-type: none"> ❖ Panitera Masa Jabatan Sebelumnya · Profil Sekretaris Jenderal <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sekretaris Jenderal Masa Jabatan Sebelumnya 	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun

3.	Profil Dewan Etik • Dewan Etik	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
4.	• Peraturan Dewan Etik • Keputusan Dewan Etik	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
5.	Permohonan Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	Sepanjang belum diputus
6.	Perkara Teregistrasi	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	Sepanjang belum diputus
7.	Jadwal Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
8.	Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	Tidak terbatas
9.	Ikhtisar Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
10.	Anotasi	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
11.	Prosedur Pendaftaran Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun

			Teknis Persidangan			
12.	Rekapitulasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
13.	Tahapan Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
14.	Risalah Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
15.	Peraturan MK	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
16.	Peraturan Ketua MK	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
17.	Peraturan Sekretaris Jenderal	(Masing-masing Biro Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	(Masing-masing Biro Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
18.	Rencana Strategis	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
19.	Rencana Kerja	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
20.	Dokumentasi Foto Persidangan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital	5 tahun

			dan Kerja Sama Dalam Negeri			
21.	Dokumentasi Audio Persidangan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
22.	Dokumentasi Video Persidangan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (YouTube MK)	5 tahun
23.	Siaran Pers	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
24.	Berita Sidang dan Non Sidang	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
25.	Iklan Layanan Masyarakat	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK, Media Sosial MK)	5 tahun
26.	Laporan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Keuangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
27.	Laporan Kinerja/LAKIP	Inspektorat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun

28.	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
29.	Laporan Tahunan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
30.	Data Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
31.	Statistik Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK) Digital (Laman MK)	5 tahun
32.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara: <ul style="list-style-type: none"> • Hakim Konstitusi • Panitera • Sekretaris Jenderal 	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Keuangan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
33.	Daftar (Proposal) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
34.	Nota Kesepahaman	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
35.	Informasi Lelang	Biro Umum	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun

36.	Daftar Inventaris Barang	Biro Umum	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
37.	Jurnal Konstitusi dan <i>Constitutional Review</i>	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara	Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi	Gedung Mahkamah Konstitusi	Cetak, Digital (Laman MK)	5 tahun
38.	Hasil Penelitian	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara	Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
39.	Putusan Landmark	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
40.	Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
41.	Majalah Konstitusi	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
42.	Penghargaan	(Masing-masing Biro Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	(Masing-masing Biro Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya)	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
43.	Informasi Pelayanan Publik	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Fasilitas	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun

			Reformasi Birokrasi			
44.	Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Biro Umum	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun
45.	Informasi Lembar Kerja Evaluasi Wilayah Bebas Korupsi Unit Kerja	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Gedung Mahkamah Konstitusi	Digital (Laman MK)	5 tahun

Tidak terdapat informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian.